



INTISARI

Membangun legitimasi Orde Baru melalui pelaksanaan pemilu tidaklah semudah yang dipikirkan pihak penguasa. Dari 5 pelaksanaan pemilu Orde Baru (tahun 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992) fenomena yang selalu tampak adanya *ketegangan dan krisis politik* menjelang dan selama rangkaian pelaksanaan pemilu. Studi ini beranjak dari asumsi bahwa pembangunan ekonomi (pertumbuhan) dan pemilu bagi Orde Baru (Orba) merupakan 2 sisi dari suatu proses legitimasi kekuasaan Orba. Bila pembangunan ekonomi diletakkan sebagai wadah proses legitimasi tersebut maka pelaksanaan pemilu berfungsi sebagai alat yang dianggap demokratis mendapatkan legitimasi kekuasaan secara efektif dan efisien pada kurun satu kali lima tahun, terlepas dari dimensi etika politik cara mendapatkannya.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada dua (2) pokok masalah Orba. Pertama, bagaimana bentuk atau strategi rekayasa yang dilakukan Orba dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Termasuk di dalamnya telaah kritis mengenai tujuan yang hendak dicapai dengan rekayasa tersebut. Kedua, bagaimana pengelolaan basis dukungan dari perolehan suara tiap konstantan di tiap pemilu. Data yang digunakan adalah data *Dokumentasi*.

Secara kualitatif, hasil pemilu 1971 - 1992 senantiasa memuat adanya perlawanan dari beragam kekuatan politik di luar negara-penguasa rejim Orba akan legitimasi Orba. Masyarakat pemilih tidak dengan mudah memilih Golkar sebagai pilihan walaupun dibawah tekanan aparat pemerintahan. Perlawanan tersebut ditunjukkan dengan dinamika perolehan suara Golkar di daerah tingkat II sejak pemilu 1971 sampai dengan pemilu 1992.

Wujud reaksi penguasa rejim Orba dalam menyikapi perlawanan massa pemilih teraktualisasikan dalam formasi anggota DPR dan MPR khususnya yang di bawah kendali langsung seperti anggota DPR terpilih dari Golkar, anggota DPR yang diangkat (Golkar ABRI maupun Golkar Bukan ABRI), anggota MPR tambahan Utusan ABRI (Golkar ABRI maupun Golkar bukan ABRI), anggota MPR tambahan Utusan DPP dari Golkar, sebagian besar anggota MPR tambahan Utusan Daerah dan anggota MPR tambahan Utusan Golongan-Golongan. Sedangkan kendali bagi formasi anggota DPR dan MPR dari luar Golkar dan ABRI dilakukan dengan beragam kebijakan (penelitian khusus, intervensi melalui konflik intern partai dan sebagainya).

Kendali atas formasi keanggotaan DPR dan MPR tersebut diatas menjamin legitimasi penguasa Orba untuk 5 tahun pasca pemilu dengan terpilihnya kembali Presiden Soeharto sebagai kepala negara di tiap Sidang Umum MPR.

